

**HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL DI DESA MARUNGGI  
KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Strata Satu (SI) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah*



Oleh

Silvia Septriani Putri  
NIM. 17005039

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN  
NONFORMAL DIDESA MARUNGGI  
KOTA PARIAMAN**

Nama : Silvia Septriani Putri  
NIM/TM : 17005039/2017  
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 04 Februari 2022

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan  
Pendidikan Luar Sekolah

  
Dr. Ismanur, M.Pd  
NIP. 19760623 200501 2 002

Disetujui,  
Pembimbing

  
Vevi Sunarti, S.Pd., M.Pd  
NIP. 198212142008122002

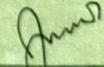
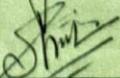
## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Penguji Skripsi  
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Padang

Judul : Hubungan Antara Dukungan Pemerintah Desa dengan  
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pendidikan  
Nonformal di Desa Marunggi Kota Pariaman  
Nama : Silvia Septriani Putri  
NIM/ BP : 17005039/ 2017  
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 04 Februari 2022

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Vevi Sunarti, S.Pd., M.Pd	1. 
2. Anggota : Dr. Irmawita, M.Si	2. 
3. Anggota : Dr. Setiawati, M.Si	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silvia Septriani Putri

NIM/ BP : 17005039/ 2017

Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas : Ilmu Pendidikan

Judul : Hubungan Antara Dukungan Pemerintah Desa Dengan Partisipasi Masyarakat  
Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal DiDesa Marunggi Kota Pariaman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari ditemukan kesamaan atau penjiplakan, maka saya bersedia bertanggung jawab untuk menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari berbagai pihak, saya ucapkan terima kasih.

Padang, 30 Januari 2022

Yang menyatakan



Silvia Septriani Putri  
17005039

## ASTRAK

Silvia Septriani Putri 2022. Hubungan Antara Dukungan Pemerintah Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Didesa Marunggi Kota Pariaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan belum berjalan secara optimal di desa Marunggi Kota Pariaman. Masih banyak pendidikan nonformal yang belum terlaksana dan banyak menghadapi masalah. Hal ini diduga adanya keterkaitan dengan dukungan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui gambaran dukungan pemerintah didesa marunggi kota pariaman 2) untuk mengetahui gambaran partisipasi masyarakat pendidikan non formal di desa marunggi kota pariaman 3) untuk mengetahui hubungan antara dukungan pemerintah dengan keikutsertaan warga dalam pelaksanaan pendidikan non formal didesa marunggi kota pariaman.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 113 orang dan sampel penelitian ini adalah 54 masyarakat yang terdaftar pada pendidikan program nonformal dengan teknik pengambilan sampling *Cluster Random Sampling* merupakan randomisasi kelompok. Analisis penelitian ini yaitu korelasional *pearson product moment*. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) gambaran dukungan pemerintah didesa marunggi kota pariaman dikategorikan sangat tinggi 2) gambaran partisipasi dalam pelaksanaan Pendidikan non formal dikategorikan sangat tinggi 3) terdapat keterkaitan sangat jelas antara dukungan pemerintah terhadap antusias warga dalam pelaksanaan Pendidikan non formal didesa marunggi. Hasil penelitian ini Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan nonformal di desa Marunggi Kota Pariaman.

Saran dalam penelitian ini adalah 1) diharapkan bagi Lembaga pemerintah harus adanya dorongan terhadap masyarakat dalam kegiatan Pendidikan non formal yang berguna memberikan wadah untuk dapat menambah ilmu sepanjang hayat 2) pemerintah desa perlu mencari tambahan dana dengan melakukan penggalangan keuangan 3) pemerintah mampu mencari tenaga pendidik dengan mengikutsertakan Lembaga serta organisasi sosial kemasyarakatan 4) warga yang mengikuti Pendidikan non formal wajib bisa mempergunakan bantuan serta fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah desa 5) warga diharap mendukung pemerintah dalam usaha peningkatan mutu sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** Dukungan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Nonformal

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kharuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Dukungan Pemerintah Desa dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pendidikan Non Formal di Desa Marunggi Kota Pariaman ”. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, dan bantuan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak prof. Rusdinal, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Ismaniar, M.Pd selaku ketua jurusan pendidikan luar sekolah fakultas ilmu pendidikan universitas negeri padang
3. Bapak alim harun pamungkas, M.Pd selaku sektretaris jurusan pendidikan luar sekolah
4. Ibu Dr. Setiawati, M.Si selaku ketua laboratorium jurusan pendidikan luar sekolah

5. Ibu Vevi Sunarti S.Pd, M.Pd selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Prof. Dr. Jamaris, M.Pd selaku dosen pembimbing akademik (PA)
7. Ibu Dra. Setiawati M.Si selaku selaku dosen penguji yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Dr. Irmawita. M.Si selaku selaku dosen penguji yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Karyawan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
10. Bapak Adrizal selaku kepala Desa Marunggi yang telah mengizinkan peneliti untuk melaksanakan penelitian
11. Ibu Fitrah Husni, S.Pd sekretaris Kantor Desa Marunggi yang telah mengizinkan dan membimbing peneliti untuk melaksanakan penelitian
12. Masyarakat desa Marunggi telah membantu dalam pengumpulan data penelitian
13. Teristimewa untuk orangtua saya yang selalu mendo'akan dan menyemangati dalam setiap langkah dalam pencapaian ini
14. Abang dan kakak yang selalu membantu, menyemangati saya
15. Kepada teman-teman PLS angkatan 17, yang telah memberikan jawaban atas setiap pertanyaan, kritik, dan saran dikala terdapat kekurangan, dan memberikan semangat dalam proses membuat skripsi ini

16. Kepada seluruh pihak yang sudah membantu yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas segala bantuan dengan karunia-Nya

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Defenisi Operasional .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Pustaka.....	12
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal .....	12
2. Pelaksanaan Pendidikan NonFormal.....	17
3. Dukungan Pemerintah Desa .....	27
B. Hubungan Dukungan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dengan Pelaksanaan Pendidikan Non Formal .....	31
C. Penelitian Relevan.....	34
D. Kerangka Berpikir .....	35
E. Hipotesis Penelitian/Pertanyaan Penelitian .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	38
1. Populasi Penelitian .....	38
2. Sampel Penelitian.....	38
C. Instrumen dan Pengembangannya.....	39
D. Teknik Pengumpulan data .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Hasil Penelitian .....	46
1. Gambaran Data dukungan pemerintah desa Marunggi Kota Pariaman .....	46
2. Gambaran Data Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal.....	48
3. Hubungan Dukungan Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal .....	52
B. Pembahasan .....	53
1. Dukungan Pemerintah Desa .....	53
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal .....	56

3. Hubungan Dukungan Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Didesa Marunggi Kota Pariaman .....	58
--	----

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Table 1. Populasi Penelitian.....	38
Table 2. Sampel Penelitian.....	39
Tabel 3. Indeks Relibilitas.....	43
Tabel 4. Alternatif Jawaban Instrumen Penelitian .....	43
Table 5. Gambaran Data Variabel Dukungan Pemerintah Desa.....	46
Table 6. Distribusi Frekuensi Variabel Dukungan Pemerintah Desa .....	47
Table 7. Gambaran Data Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal .....	49
Table 8. Distribusi Frekuensi Variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal .....	50
Table 9. Uji Korelasi Hubungan Antara Dukungan Pemerintah dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hakikat pembangunan nasional merupakan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan warga Indonesia. Dasar pembangunan nasional Indonesia merupakan Pancasila yang berupaya agar mencapai tujuan nasional ialah menghasilkan warga yang adil serta jaya. Pendidikan ialah kunci pembentukan sebuah negara. Pembangunan pendidikan ditujukan agar menciptakan individu Indonesia yang pintar serta berkompetitif melewati penyediaan persediaan, daya jangkau, mutu serta relevansi, kesamaan serta kepastian mendapatkan pembelajaran.

Pendidikan adalah salah satu aspek yang di harapkan sanggup menghasilkan generasi yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang di alami warga. Tingkatan mutu seseorang itu bisa lewat melewati 3 metode pendidikan, ialah pendidikan formal, informal, serta nonformal. Namun tak diingkari kalau perkembangan warga dibidangkan pendidikan bisa didapat dengan kerja sama pada 2 ataupun lebih metode pendidikan. Disamping terdapatnya pendidikan formal sudah hadir pendidikan nonformal serta pendidikan informal. Timbulnya bermacam sebutan pendidikan memperlihatkan kemajuan terselenggarannya pendidikan baik wajar serta luas, yang memberikan makna jika pendidikan tak hanya dilaksanakan disekolah saja. Pendidikan nonformal mempunyai perbandingan dengan pendidikan formal. Pendidikan nonformal selaku aspek dari system pendidikan mempunyai kewajiban terhadap pendidikan

yang lain ialah membagikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat (Heningtyas et al., 2015).

Sudjana (2015) menerangkan kalau pendidikan nonformal mempunyai tingkatan pada tatanan serta seragam yang jauh tidak sempit dibandingkan dengan tingkatan tatanan serta seragam pendidikan formal. Pendidikan nonformal mempunyai rupa serta isi program yang bermacam-macam, sebaliknya pendidikan formal secara umumnya mempunyai rupa serta inti program yang serupa agar disetiap satuan, jenis, serta tingkatan pendidikan. Tujuan rancangan pendidikan nonformal tidak seragam, sebaliknya tujuan rancangan pendidikan formal seragam agar disetiap satuan serta tingkatan pendidikan. Pendidikan nonformal terdapat agar menunjang pendidikan formal yang disekelilingnya tidak dapat di maksimalkan bakat seseorang terhadap aspek akademik.

Pelaksanaan pendidikan nonformal ialah salah satu upaya dalam pengembangan kemampuan, keterampilan serta bakat yang kedepannya sbegitu bermanfaat dalam penyelesaian tantangan hidup di lingkungan sosial. Disamping itu, pendidikan nonformal juga begitu menolong dalam menjembatani kesenjangan yang terjadi pada pendidikan formal (Syafudin, 2016). Hal yang berkaitan dengan pendidikan nonformal didasari oleh kebutuhan pendidikan, jenis pendidikan nonformal didasari pada fungsinya yaitu pendidikan keaksaraan, pendidikan vokasional, pendidikan kader, pendidikan umum serta penyuluhan, pendidikan penyegaran jiwa-raga (Sanapiah, 2016).

Hal yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan nonformal adalah partisipasi yang di berikan masyarakat, tidak hanya dalam bentuk materi saja,

namun masyarakat juga ikut menyelenggarakan dan dan berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga serta pikiran untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dalam dunia pendidikan. Partisipasi masyarakat yang besar ditentukan dengan cara lembaga berhubungan baik dengan masyarakat tersebut. Suryosubroto (2012) mengatakan bahwa banyak yang menjadi perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah program dalam bentuk perencanaan dalam membuat keputusan, pelaksanaan program serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil dan evaluasi dalam program yang telah dilakukan.

Masyarakat seharusnya berperan penting dalam pembangunan desanya sendiri. Banyaknya masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan nonformal, setiap pertemuan yang diadakan masyarakat yang hadir yang aktif saja, sehingga tujuan utama dari pendidikan nonformal untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana. Pendidikan nonformal seharusnya diselenggarakan oleh warga yang membutuhkan pelayanan pendidikan yang bertujuan selaku penambahan dari pendidikan formal didalam rancangan mendorong pendidikan seumur hidup yang selalu dapat dimanfaatkan (Siswanto, 2012).

Desa Marunggi adalah desa yang terletak di Kota Pariaman, mengenai pendidikan nonformal telah berjalan sejak lama, pendidikan nonformal yang ada di desa Marunggi diantaranya majelis taklim, PKK, karang taruna, remaja Masjid. Berlandaskan pada observasi sebelumnya yang dilakukan peneliti pada tanggal 6 Juli 2021, didapatkan hasil bahwa dukungan pemerintah desa dalam pelaksanaan belum berjalan secara optimal. Penyebab pendidikan nonformal tidak efektif

dikarenakan topoksi yang tidak berjalan dengan baik pada masing-masing pendidikan. Program tetap berjalan namun segala kebutuhan kegiatan masih berkolaborasi antara panitia dengan pemerintah desa bukan asli dari panitia pendidikan nonformal tersebut. Kelemahan yang peneliti temukan di balai Desa yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah desa yaitu, pada administrasi desa tidak adanya buku tahunan untuk kegiatan nonformal dikarenakan berbagai hal yang tidak menjadi perhatian pemerintah desa.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat mengenai pendidikan nonformal, berikut ini adalah jumlah anggota yang terdaftar di kegiatan nonformal di desa Marunggi:

Berdasarkan dari pengamatan dilihat bahwasanya rendah partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal yang di adakan di desa Marunggi. Dimana sebanyak 113 anggota Pendidikan non formal terdaftar secara resmi dengan jenis Pendidikan PKK sebanya 21 anggota, LPM sebanyak 17 anggota, Posyandu balita sebanyak 30 anggota, Posyandu Lansia sebanyak 10 anggota, dan karang taruna sebanyak 35 anggota. Dari 21 anggota PKK yang terdaftar hanya 5 orang yang aktif berpartisipasi, 17 anggota LPM yang terdaftar hanya 3 orang yang aktif dan berpartisipasi, sementara untuk posyandu dari 30 anggota hanya 7 orang yang aktif dalam kegiatan, posyandu lansia anggota berjumlah 10 orang hanya 3 orang yang aktif berpartisipasi dan untuk karang taruna dari 35 anggota hanya 6 orang yang aktif dan berpartisipasi.

Pada penjabaran diatas terlihat kegiatan nonformal di bidang PKK, LPM, karang taruna belum berjalan cukup baik. Berlandaskan pada hasil observasi

kedua yang dilakukan peneliti ditanggal 9 Oktober 2021, untuk partisipasi masyarakat masih dengan pencapaian target baru 70-80 %. Kegiatan nonformal dibidang kesehatan seperti posyandu balita dan lansia tetap berjalan setiap tahun dan memiliki kendala di 2020 dan 2021 karna Covid 19, namun setiap bulan dilaksanakan tetapi masih memiliki partisipasi yang rendah dimana masyarakat yang berpartisipasi dalam posyandu setiap bulannya masih orang yang sama, sedangkan masyarakat desa marunggi tergolong banyak untuk balita, remaja dan lansia.

Selain itu, masih banyak pendidikan nonformal yang belum terlaksana, dan banyak menghadapi masalah seperti: pendidikan anak usia dini yang tidak mendapatkan perhatian secara maksimal dibanding pendidikan lain, contoh pendidikan dasar ditambah terdapatnya rendah wawasan serta dikurang didukungnya kesadaran orangtua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD), hingga menyebabkan minimnya optimal penyuluhan PAUD kepada semua warga, selain itu masih rendahnya peran warga terhadap keberlangsungan kegiatan Belajar (Kejar), hal lainnya masih adanya ketidaksetaraan gender dalam jenjang pendidikan, pekerjaan serta kesempatan dana yang tidak tepat sasaran seperti penyalur, total yang disalurkan, manfaat dan waktu saat dilaksanakan program atau *block grant* diberikan pemerintah. Masih banyak kegiatan yang di lakukan pemerintah guna menjalankan kegiatan nonformal. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan ekstra pemerintah desa dalam menanggulangi, masalah yang pada masyarakat dengan pendidikan nonformal yang berkualitas.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 Oktober 2021 didapat bahwasanya partisipasi masyarakat di Desa Marunggi dikatakan cukup tinggi, hal ini dikarenakan adanya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan seperti Karang Taruna, PKK dan Posyandu Yang diadakan rutin, Dimana kegiatan Karang Taruna melaksanakan kegiatan seperti kegiatan kepemudaan serta adanya turnamen, untuk kegiatan PKK adanya kegiatan seperti lomba-lomba antar dusun dan juga lomba senam antar dusun dimana masyarakat ikut serta dalam kegiatan tersebut

Pelaksanaan pendidikan nonformal, tidak terlepas dari dukungan pemerintah desa. Peran pemerintah dilaksanakan lewat 3 sesi, ialah sesi persiapan, penerapan, serta penilaian. Dalam sesi persiapan, pemerintah memiliki peran didalam penghimpunan isu-isu strategis yang terdapat pada warga, menimbulkan kebijakan, serta memastikan rancangan – rancangan yang hendak dilakukan. Dalam sesi persiapan pemerintah berfungsi selaku regulator, sebab pemerintah memberi landasan pada masyarakat selaku indikator agar mengendalikan seluruh aktivitas layanan dari ketetapan yang telah ditentukan. Berikutnya didalam sesi penerapan, pemerintah berfungsi selaku pelaksana atas layanan itu. Tidak hanya itu, pemerintah memiliki peran selaku dinamisor yang menjalankan rancangan – rancangan yang sudah diatur serta dirancang tersebut melewati pemberian bimbingan serta arahan dengan mendalam serta efisien terhadap warga (Dinisti, 2017).

Bimbingan yang diberikan telah terlaksana disalurkan dari penyuluh ataupun aspek khusus agar memberi pelatihan. Didalam sesi ini pemerintah dapat

berfungsi selaku fasilitator, yang mana membuat keadaan yang terkendali dalam menjalankan layanan agar menghubungi bermacam keperluan warga didalam memaksimalkan pembangunan. Selaku fasilitator, pemerintah berperan pada aspek pendampingan lewat pelatihan, pembelajaran, serta peningkatan keterampilan, dan pada aspek pendanaan lewat pemberian bantuan terhadap warga. Setelah itu disesi penilaian, pemerintah memiliki bagian didalam melaksanakan penilaian serta merancang laporan tentang layanan yang sudah diberi pada warga (Dinisti, 2017). Wahyudi (2016) mengatakan bahwa guna mengatasi permasalahan peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur desa bahwa SDM pemerintah desa dilihat dari kualitas dan kuantitas, dirasakan tidak mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai visi desa. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa seperti kegiatan nonformal.

Desa marunggi adalah sebuah desa yang terletak di Kota Pariaman, desa marunggi memiliki 6 dusun yang terdiri dari Dusun Pasir Sigadondong, dusun tabing Runtuh, Dusun Binasi, Dusun Pasar Ganting, Dusun Duku Gadang. Desa Marunggi memiliki system pemerintahan yang sangat mendukung dalam pelaksanaan Pendidikan non formal seperti, Karang Taruna, LPM, Posyandu , PKK dan semua itu terkelola dengan baik.

Berlandaskan pada kejadian yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti berminat meneliti mengenai “Hubungan Dukungan Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di Desa Marunggi Kota Pariaman”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan pada pemaparan yang ada pada latar belakang dan fenomena yang ditemui dalam proses pembelajaran sehingga peneliti dapat mengidentifikasi masalah:

1. Belum optimalnya dukungan pemerintah desa pelaksanaan pendidikan nonformal
2. Rendahnya espektasi masyarakat tentang pendidikan
3. Kearifan lokal masyarakat setempat yang menganggap pendidikan tidak penting

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi yang telah dijabarkan diatas, bahwa penulis memberi pembatasan terhadap belum optimalnya dukungan pemerintah desa dalam pelaksanaan pendidikan nonformal di desa marunggi kota pariaman.

## **D. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada permasalahan yang ada maka peneliti merumuskan apakah terdapat hubungan antara dukungan pemerintah dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan nonformal di desa marunggi kota pariaman?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran dukungan pemerintah di Desa Marunggi Kota Pariaman terhadap Pendidikan non formal
2. Untuk mengetahui gambaran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pendidikan nonformal di Desa Marunggi Kota Pariaman

3. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan pemerintah dengan keikutsertaan warga didalam pelaksanaan pendidikan nonformal di Desa Marunggi Kota Pariaman.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat oleh penelitian ini ialah :

1. Manfaat teoritis

Bertambahnya pengetahuan ilmu Pendidikan non formal pada aspek pengelolaan pendidikan luar sekolah, khususnya pada pembangunan masyarakat

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini bisa dijadikan pedoman didalam memberikan dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan pendidikan nonformal di Desa Marunggi
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa mejadi acuan dan wawasan dalam mengembangkan pendidikan nonformal yang berkualitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan nonformal
- c. Bagi lembaga pendidikan nonformal, penelitian ini bisa menjadi acuan dan menjadikan motivasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan nonformal

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pengertian yang operasional kepada pembaca, maka penulis memberikan kejelasan judul penelitian yang digunakan, dan kejelasan istilah yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

## 1. Dukungan Pemerintah Desa

Menurut widjaya HAW dalam (Cut Mafzatun dkk 2017:36) menyatakan bahwa desa ialah selaku kesatuan masyarakat hukum yang punya kewenangan guna mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan asal usul serta adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan ialah sekumpulan orang mengelola kewenangan, melakukan kepemimpinan, serta koordinasi dan pembangunan tempat mereka bekerja. Secara etimologi, pemerintahan bisa sebagai yang melaksanakan pekerjaan didalamnya 2 pihak yaitu memerintah, mempunyai tanggungjawab yang diperintah mempunyai kepatuhan serta keharusan (Adon, 2015).

Peran lebih memperlihatkan sesuatu manfaat, penyesuaian diri serta selaku sebuah tahapan, peran merupakan seseorang yang menepati posisi ataupun tempat didalam warga dan dapat melaksanakan suatu peran. Peran pemerintah dapat terlaksana dalam 3 tahap, seperti tahap persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi (Dinisti, 2017).

Dukungan pemerintah didalam penelitian ini ialah tahapan pelaksanaan & evaluasi tentang pendidikan menurut masyarakat setempat. Peran dukungan pemerintah desa dapat di ukur menurut Munir (2010) dukungan pemerintah desa dalam penelitian ini adalah dukungan yang menggunakan indikator-indikator *entrepreneur*, koordinator, fasilitator.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan ikut serta dalam memberi saran, pendapat, kreativitas, berbentuk barang serta jasa kepada masyarakat dalam mengambil

suatu keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk tingkah laku yang dilakukan secara nyata dalam pendidikan nonformal, yang berupa keterlibatan mental, emosi, materi dan keikutsertaan dalam menyelenggarakan dan dan berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga serta pikiran untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dalam dunia pendidikan Partisipasi masyarakat yang besar ditentukan dengan cara lembaga berhubungan baik dengan masyarakat tersebut.

Suryosubroto (2012) mengatakan bahwa banyak yang menjadi perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah program dalam bentuk perencanaan dalam membuat keputusan, pelaksanaan program serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil dan evaluasi dalam program yang telah dilakukan.

Indikator partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal menurut Normina (2016) adalah Partisipasi financial, Partisipasi material, Partisipasi akademik, Partisipasi kultural

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal**

###### **a. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yakni "*participation*" yang berarti sebuah aktivitas dalam membangkitkan perasaan serta dilibatkan ataupun ambil bagian dalam aktivitas sebuah organisasi. Partisipasi merupakan peran serta dalam bagian kegiatan suatu kegiatan. Partisipasi yaitu peran seseorang ataupun sekumpulan warga didalam suatu tahapan pembangunan pada aspek pernyataan ataupun aspek aktifitas menyumbangkan pemikiran, waktu, tenaga, kepandaian, materi atau modal, serta ikutserta menikmati hasil dari pembangunan yang telah dilakukan (Sumaryadi, 2014). Hal lain juga dikemukakan oleh Jalal & Supriadi. (2011) partisipasi merupakan ikut serta dalam memberi saran, pendapat, kreativitas, berbentuk barang serta jasa kepada masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu partisipasi juga bermaksud dalam mengkaji suatu pilihan dalam mengambil suatu keputusan atau dalam memecahkan masalah baik individu ataupun kelompok.

Simatupang (dalam Latif et al., 2019) mengemukakan beberapa rincian terkait partisipasi yakni:

- 1) Partisipasi ialah sesuatu yang dikerjakan ialah bagian dari upaya bersama yang dilaksanakan bersama dengan orang lain sebangsa serta setana air guna membangun masa depan bersama.

- 2) Partisipasi artinya selaku kerja guna pencapaian tujuan bersama diantara seluruh warga Negara yang punya latar belakang kepercayaan yang beragam dalam Negara pancasila ataupun dasar hak serta kewajiban.

Selain itu, Britha dalam (Kurniyati, 2019) mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti yakni partisipasi ialah:

- 1) Kontribusi sukarela dari masyarakat terhadap program tanpa ikut serta dalam mengambil kebijakan.
- 2) Pemekaan pihak masyarakat guna peningkatan kemampuan menerima serta guna menjalankan program yang membangun.
- 3) Sebuah proses aktif, yang punya makna bahwasanya individu ataupun kelompok yang berkaitan, pengambilan inisiatif serta memakai kebebasannya guna melaksanakan hal tersebut.
- 4) Pemanfaatan perbincangan antara masyarakat setempat dengan staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan, monitoring program, guna mendapatkan informasi terkait konteks lokal, serta dampak sosialnya.
- 5) Masyarakat terlibat sukarela dalam perubahan yang ditetapkannya sendiri.
- 6) Masyarakat terlibat dalam membangun diri, kehidupan, serta lingkungannya.

Masyarakat ialah sekumpulan orang yang punya peranan sama ataupun menyatu satu sama lain sebab saling berbagi identitas, kepentingan yang sama, perasaan memiliki, serta umumnya pada satu tempat yang sama. Terdapat beberapa fungsi masyarakat yakni penyediaan serta pendistribusian barang-barang serta jasa, lokasi aktivitas bisnis serta perkerjaan, sosialisasi, keamanan publik, wadah pendukung ataupun gotong royong dan kontrol sosial.

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses saat seseorang ataupun suatu kelompok dan organisasi dalam mengambil sebuah peran dan ikut berperan serta dalam mempengaruhi perencanaan serta pengamatan ketetapan yang berjalan dan dapat memberikan dampak pada kehidupan individu atau kelompok tersebut (Hetifah, 2015). Sejalan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi ialah keterlibatan aktif masyarakat ataupun partisipasi tersebut bias dimaksudkan keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Isbandi dalam (Devita, 2013) menyampaikan bahwasanya partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian permasalahan serta potensi yang terdapat di masyarakat, memilih pengambilan keputusan terkait solusi guna penyelesaian permasalahan, penyelenggaraan upaya guna mengatasi permasalahan serta keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebuah wilayah menjanjikan sebuah proses yang sifatnya kolaboratif dimana segala lapisan masyarakat bisa merumuskan tujuan bersama (*common goals*), ikut serta dalam penentuan keputusan kolektif, penciptaan ruang, dimana ruang ini ialah tempat guna mengekspresikan harapan mereka.

Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi semua anggota warga didalam mencari persoalan-persoalan yang ada di wilayah itu. Partisipasi warga dalam aspek kesehatan memiliki arti partisipasi semua anggota warga didalam mencari jalan pemecah permasalahan kesehatan. Didalam hal ini, warga lah yang berperan aktif memikirkan, merancang, menjalankan, serta mengevaluasikan

rancangan–rancangan kesehatan warganya. Institusi kesehatan hanya sekadar memberi dorongan serta arahan (Notoatmodjo, 2017).

Adanya partisipasi masyarakat secara aktif, masyarakat sanggup mengemukakan aspirasi mereka serta permasalahannya sendiri selaku orang yang ikut serta dari perencanaan, pelaksanaan serta hasil. Penumbuhan kesadaran diri serta partisipasi masyarakat menunukan masyarakat tidak cuma selaku objek pembangunan namun punya peranan selaku penyampai aspirasi serta juga perencana pembangunan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat ialah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang orientasinya pada capaian hasil pembangunan yang dilaksanakan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat ialah upaya penggunaan serta pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif serta efisien baik dari; (a) aspek masukan ataupun input sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana serta teknologi; (b) dari aspek proses pelaksanaan, monitoring serta pengawasan; (c) dari aspek keluaran ataupun output, capaian sasaran, efektifitas serta efisiensi. Dengan partisipasi masyarakat, di upayakan lebih terarahnya perencanaan pembangunan, berarti rencana ataupun program pembangunan yang disusun itu ialah selaras dengan yang diperlukan oleh masyarakat, artinya dalam menyusun rencana ataupun program pembangunan dilaksanakan penetapan prioritas (urutan didasarkan besar kecilnya tingkatan kepentingannya), dengan demikian penyelenggaraan program pembangunan akan secara efektif serta efisien terlaksana juga.

**b. Manfaat partisipasi**

Pariatra Westra dalam (Villega, 2013) mengemukakan manfaat partisipasi yakni:

- 1) Lebih mengedepankan didaptkannya ketentuan yang tepat.
- 2) Bisa dipakai kompetensi berpikir kreatif.
- 3) Bisa jadi pengendali nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta menunjang kepentingan bersama.
- 4) Mendorong individu guna lebih bertanggung jawab.
- 5) Memberi kemungkinan lebih guna mengikuti perubahan.

Pendapat lain dikemukakan oleh selain itu, Burt K. Schalan dan Roger (Villega, 2013) menyampaikan bahwasanya manfaat dari partisipasi yakni:

- 1) Komunikasi lebih dua arah.
- 2) Kebijakan lebih banyak dipengaruhi dari bawah.
- 3) Kurang bersikap agresifnya manajer serta partisipasi.
- 4) Potensi guna memberikan sumbangan yang bermakna serta positif, dianggap dalam derajat lebih tinggi.

Didasarkan yang dikemukakan ahli, bisa disimpulkan bahwasanya partisipasi akan memberikan manfaat yang berarti bagi pencapaian tujuan yakni:

- 1) Memberi kemungkinan lebih didaptkannya kebijakan yang tepat sebab berbagai sumbangsih yang berarti serta positif.
- 2) Mengutamakan komunikasi dua arah hingga membuat partisipasi ataupun pembuat kebijakan punya kesempatan yang sama dalam mengemukakan idenya.

- 3) Membuat terdorongnya kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan bersama.
- 4) Melatih guna bertanggung jawab serta membuat dorongan guna membangun kepentingan bersama.
- 5) Memungkinkan guna terlibat pada tiap perubahan yang ada.

## **2. Pelaksanaan Pendidikan NonFormal**

### **a. Pengertian**

Pendidikan Luar sekolah atau yang sering disebut Pendidikan Non Formal (PNF) serta juga pendidikan informal (pendidikan dalam keluarga) adalah salah satu bagian dari jalur penyelenggaraan pendidikan ya ada di Indonesia, yang mempunyai perbedaan dengan pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur serta berjenjang. Pendidikan nonformal dilaksanakan oleh warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang punya fungsi selaku pengganti, penambah, dan/atau pelengkap dari pendidikan formal guna memberi dukungan terhadap pendidikan sepanjang hayat. Selain itu, fungsinya yaitu guna pengembangan kemampuan peserta didik yang ditekankan pada penguasaan pengetahuan serta keterampilan fungsional serta untuk mengembangkan sikap serta kepribadian profesional (Sunarti, 2014).

Para ahli pendidikan nonformal menjelaskan pendidikan nonformal cukup banyak. Pendidikan nonformal merupakan aktivitas pembelajaran yang terarah yang dilaksanakan diluar sistem formal, baik tersendiri ataupun aspek dari sebuah aktivitas yang meluas, yang ditujukan agar membagikan pelayanan pada target yang telah ditentukan didalam menggapai pencapaian belajar (Sanapiah,

2016). Pendidikan nonformal merupakan tiap peluang yang mana ada interaksi yang terencana di luar sekolah serta individu mendapatkan data, wawasan, pelatihan ataupun pembinaan sejalan pada tingkatan umur serta keperluan hidup, yang bertujuan memperluas tingkatan keahlian, perilaku serta nilai-nilai yang membolehkan menurutnya jadi anggota yang efisien serta efektif pada area keluarga, pekerjaan hingga lingkungan warga serta negaranya (Soelaman, 2015).

Sudjana (2015) dalam bukunya menarangkan kalau “pendidikan nonformal ialah satu diantara dari banyaknya istilah yang timbul pada riset kependidikan di akhir tahun 70-an. Istilah-istilah pendidikan yang tumbuh pada tingkatan internasional dimulai pada pendidikan sepanjang hayat (*lifelong education*), pendidikan update (*recurrent education*), pendidikan abadi (*permanent education*), pendidikan informal (*informal education*), pendidikan masyarakat (*community education*), pendidikan ekspansi (*extension education*), pendidikan massa (*mass education*), pendidikan social (*social education*), pendidikan orang berusia (*adult education*), serta pendidikan berkepanjangan (*continuing education*)”

Pendidikan nonformal telah ada semenjak dahulu serta menghubungkan di dalam kehidupan warga lebih tua dibandingkan pada adanya pendidikan sekolah. Nabi serta Rasul yang melaksanakan pergantian berdasarkan pada keyakinan, metode berpikir, sopan santun serta cara- cara hidup dalam menikmati kehidupan dunia ini, bersumber pada masa lampau, upaya ataupun pergerakan yang dicoba bergerak pada jalan pendidikan nonformal saat sebelumnya diciptakan pendidikan sekolah. Gerakan ataupun dahwah nabi serta Rosul sangat

besar bagiannya pembimbingan yang diperuntukan kepada orang tua serta anak muda. Nabi serta Rosul berupaya didalam pendidikan serta pembangunan warga lewat pendampingan orang tua serta anak muda yang berjalan diluar sistem persekolahan (Sanapiah, 2016).

Pelaksanaan pendidikan nonformal ialah salah satu usaha dalam pengembangan kemampuan, keterampilan serta bakat yang kedepannya begitu bermanfaat dalam penyelesaian tantangan hidup di lingkungan sosial. Disamping itu, pendidikan nonformal juga begitu menolong dalam menjembatani kesenjangan yang ada pada pendidikan formal (Syafudin, 2016).

Berdasarkan penjelasan telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan pelaksanaan pendidikan nonformal ialah upaya dalam pengembangan kemampuan, keterampilan serta bakat dan pendidikan serta aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan diluar lingkungan sekolah agar memenuhi pendidikan serta mendapatkan pengetahuan informasi, bimbingan dan latihan, sehingga dapat bermanfaat dan dapat dirasakan oleh keluarga, masyarakat serta negara.

#### **b. Tujuan Pendidikan Nonformal**

Tinjauan faktor tujuan pendidikan, pendidikan nonformal mempunyai tanggungjawab mencapai serta penuh tujuan tingkatan ataupun cakupannya. Timbul pendidikan nonformal berdasarkan multi purpose. Terdapat tujuan pendidikan nonformal yang terfokus dalam memenuhi pelaksanaan pendidikan berdasarkan tingkatan paling bawah (*basic education*) seperti pendidikan keaksaraan, IPA atau (ilmu pengetahuan alam), keahlian seperti vokasi,

menegani ilmu gizi serta hidup sehat, pengetahuan universal serta kewarganegaraan dan citra diri serta norma kehidupan.

Terdapat pula tujuan pembelajaran pada pendidikan nonformal yang diperuntukan buat guna keperluan pendidikan lanjutan sesudah tercapainya pendidikan tingkat dasar serta pendidikan perluasan serta pendidikan norma-norma kehidupan. Misalnya rancangan pendidikan nonformal diperuntukan memperoleh makna dalam penilaian hidup seperti: pendidikan mengaji, TPA, sekolah di hari minggu, berbagai macam latihan jiwa, yoga, “siraman kalbu”, pelatihan memaknai hidup, kelompok bakat, pembelajaran berbagai seni. Adanya pelaksanaan pembelajaran ini kehidupan manusia mempunyai makna serta nilai agama, keelokan, perilaku serta makna (Ishak, 2017).

### **c. Fungsi Pendidikan Non formal**

Fungsi dari pendidikan non formal yaitu guna pembentukan jiwa karakter dari peserta agar bisa menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan cara berinteraksi dengan segala yang ada dalam lingkungan tersebut baik dalam lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal. Pendidikan nonformal juga merupakan salah satu pendidikan yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan maupun keterampilannya. Menurut Ratna (dalam Anggrita Kumidaninggar, 2017) fungsi dari pendidikan nonformal antara lain:

- 1) Meningkatkan potensi diri ataupun keterampilan yang dimiliki oleh peserta.
- 2) Memperbaiki sikap maupun kepribadian agar lebih profesional lagi.
- 3) Melindungi integrasi dari kehidupan sosial.

- 4) Menambah pendidikan formal dilihat dari pengetahuannya, keterampilan-keterampilan, dan perilaku yang didapatkan peserta ketika belajar dalam pendidikan formal yang merasa tidak terpenuhi.
- 5) Dapat melengkapi jika peserta ketika belajar dalam pembelajaran sekolah merasakan perlu memperbaiki pengetahuannya, keterampilan-keterampilan maupun perilaku dalam sistem pendidikan nonformal.
- 6) Dari pernyataan di atas bahwa pendidikan nonformal dapat berfungsi untuk memperbaiki sikap dari peserta agar menjadi lebih baik, dan bisa meningkatkan ilmu komunikasi dalam berbagai cakupan sekitarnya di lembaga formal, informal, dan nonformal.

#### **d. Karakteristik Pendidikan Nonformal**

Ishak (2017) mengatakan bahwa Pendidikan nonformal mempunyai beda dengan sekolah pada umumnya. Tetapi keduanya dapat mendukung serta memenuhi pendidikan. Dengan adanya sejarah serta banyaknya kegiatan yang terlaksana, pendidikan nonformal mempunyai karakteristik seperti berikut ini:

1. Bertujuan agar mendapatkan keahlian yang dapat dipergunakan.
2. Memiliki pusat partisipan didik. Pendidikan nonformal memiliki ciri belajar mandiri.
3. Waktu dilaksanakan berjangka singkat, serta biasanya tidak punya hubungan
4. Memakai kurikulum kafetaria. Kurikulum ini fleksibel, terbuka, serta menjadi peminatan siswa
5. Memakai tata cara pendidikan partisipatif, ditekankan kemandirian siswa

6. Keterkaitan pendidik terhadap peserta didik memiliki sifat datar. Pendidik merupakan pembicara bukan menjadi guru.
7. Pemakaian referensi lokal. karena sumber pembelajaran sangat jarang, hingga diusahakan sumber berasal dari lokal dapat berguna semaksimal mungkin.

**e. Jenis dan Isi Pendidikan non Formal**

Sanapiah (2016) menjelaskan bahwa jenis serta pendidikan nonformal yaitu:

1. Jenis pendidikan nonformal fungsi:

a) Pendidik Keaksaraan

Program pendidikan keaksaraan fungsional ialah salah satu bentuk pelayanan pendidikan nonformal guna membelajarkan warga buta aksara. Hal ini punya tujuan guna pengembangan kemampuan serta keterampilan membaca, berhitung, menulis serta berbahasa Indonesia yang dipenuhi dengan keterampilan fungsional guna peningkatan kualitas serta taraf hidup warga (Nurmiayuni, 2014). Tipe program pembelajaran keaksaraan diperuntukan bagi tidak bisa membaca dan menulis, tidak bisa bahasa Indonesia.

Pendidikan yang diberikan pada masyarakat yang mengalami buta aksara usia 15-59 tahun dengan bentuk kemampuan dasar yang mencakup kemampuan menulis, membaca serta berhitung supaya berguna dalam kehidupannya sehari-hari sehingga masyarakat bisa meningkatkan mutu kehidupan kearah yang lebih baik disebut pendidikan keaksaraan.

b) Pendidikan Vokasional

Pendidikan vokasional ialah segala proses pendidikan yang tujuannya guna pengembangan kompetensi yang diperlukan secara efektif bisa berfungsi dalam sebuah tugas. Pendidikan vokasional fungsinya selaku wadah pengembangan kompetensi yang selaras dengan keperluan individu, sifatnya khusus sebab dijalankan atas dasar diperlukan individu. Maka jenis serta jenjang pekerjaan yang dipersiapkan oleh lembaga pendidikan vokasional yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Selain itu, tujuannya guna pengembangan *hard skills*, lalu juga orientasinya pada *soft skills*, pendidikan nilai serta perilaku (Takdira, 2013).

Pendidikan vokasional memberi kompetensi pada masyarakat guna peningkatkan mutu kehidupannya. Tipe program pembelajaran vokasioanal diperuntukan bagi yang belum terampil bisa digunakan untuk bekerja. Pendidikan ini tidak memiliki target.

#### c) Pendidikan Kader

Pendidikan kader ialah sebuah usaha yang dilaksanakan oleh suatu instansi ataupun organisasi guna terbentuknya generasi penerus yang setuju serta yakin akan tujuannya serta berjuang secara terus menerus guna mewujudkannya.. Program pembelajaran kader ditujukan sebagai pimpinan dalam lingkungan warga

Kader ialah sumber daya manusia yang melaksanakan proses pengelolaan dalam sebuah instansi. Kader ialah individu yang sudah dilatih serta dipersiapkan dengan bermacam kompetensi serta disiplin ilmu, sehingga punya kompetensi di

atas rata-rata individu pada umumnya. Kader ialah sumber daya manusia selaku calon anggota yang dipersiapkan yang menjalankan proses seleksi.

d) Pendidikan Umum dan Penyuluhan

Rancangan pembelajaran ini bermakna luas dalam semua bidang ilmu dapat dicontohkan budaya, agama, kesehatan, hukum, politik serta lainnya. Penyuluhan ialah usaha merubah tingkah laku manusia yang dilaksanakan lewat pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif dimaknai selaku rangkaian aktivitas yang dijalankan secara sistematis, terencana serta terarah dengan peranan serta aktif seseorang, kelompok, ataupun masyarakat guna pemecahan permasalahan dengan menimbang faktor ekonomi, sosial serta budaya setempat.

Selain itu, penyuluhan juga dimaknai selaku proses perubahan tingkah laku di kalangan masyarakat supaya mereka tahu, mau serta sanggup melaksanakan perubahan demi pencapaian meningkatnya produksi, pendapatan ataupun keuntungan serta memperbaiki kesejahteraannya (Subejo, 2010).

e) Pendidikan Penyegaran Jiwa-raga

Rancangan ini lebih cenderung kepada minat serta bakat yang dimiliki seperti sanggar, kursus musik, dll.

2. Program pendidikan nonformal memiliki kaitan terhadap kualitas hidup ialah dalam seni budaya, kehidupan sosial, pola pikir, bermasyarakat, mengembangkan ilmu alam, sejarah, bahasa, sosial serta ekonomi (Sanapiah, 2016).

**f. Sasaran Pendidikan Nonformal**

Soelaman (2015) mengatakan target pendidikan nonformal ialah:

## 1. Target Pelayanan

### a) Usia Pra-Sekolah (0-6 tahun)

Merupakan anak prasekolah, sebelum mendapatkan sekolah dasar atau selanjutnya bertujuan dalam pengenalan lingkungan luar.

### b) Usia Pendidikan Dasar (7-12 tahun)

Umur yang dilakukan ialah paket A serta kegiatan pramuka dilakukan secara maksimal

### c) Usia Pendidikan Menengah (13-18 tahun)

Pembelajaran non formal ini ditunjukan agar pelengkap, pembelajaran, serta peningkatan program pembelajaran untuk siswa didikan

### d) Umur Pendidikan Tinggi (19-24 tahun)

Pendidikan nonformal disiapkan untuk bermacam keahlian agar bisa untuk bekerja jadi tenaga yang profesional dapat membuat kewirausahaan.

## 2. Berdasarkan Lingkungan Sosial Budaya

### a) Masyarakat Pedesaan

Program yang diperuntukkan untuk terampil dalam sumber daya alam menjadikan mata pencarian

### b) Masyarakat Perkotaan

Warga kota tumbuh lebih cepat dengan iptek, jadi diberikan kursus yang lebih cepat

### c) Warga Terpencil

Program yang dilakukan lewat pembelajaran nonformal dalam pertumbuhan kemajuan nasional (Soelaman, 2015)

Sasaran sebagai target pembelajaran nonformal mempunyai cakupan luas. Target wajib dapat layanan pembelajaran nonformal bersamaan kebutuhannya. Kelompok yang mendapatkan kebutuhan pembelajaran (pengetahuan, keahlian, serta perilaku), maka pendidikan nonformal muncul. Pendidikan nonformal bersifat multi fungsi, dan tidak pandang umur.

Target pendidikan nonformal merupakan semua orang memerlukan pembelajaran, tingkatkan keahlian (pengetahuan, keahlian serta perilaku) mencapai mutu kehidupan lebih baik lagi serta bernilai (Ishak, 2017).

#### **g. Indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal**

Menurut Normina (2016) antusias warga didalam pendidikan bisa terwujudkan didalam bermacam bentuk :

##### **1. Partisipasi financial**

Merupakan bantuan pembiayaan yang sejalan pada kekuatan serta kesanggupan warga. Mencangkup orang tua baik kolektif bisa memberi bantuan materi yang dibutuhkan sekolah, yang sebenarnya bisa dipertanggung jawabkan agar tercapainya pendidikan yang diimpikan. Namun, lembaga bisnis serta industri diupayakan agar mampu memisahkan anggaran agar pemberian beasiswa pendidikan.

##### **2. Partisipasi material**

Direalisasikan dengan bantuan materi yang bersangkutan dengan bahan pembangunan, agar penyempurnaan bangunan ruang serta tempat dapat berkegiatan belajar bisa berjalan dengan baik. Dengan begitu warga mendorong

tercapainya lingkungan fisik yang terkendali agar aktifitas belajar/mengajar berjalan dengan baik.

### 3. Partisipasi akademik

Kepedulian warga kepada terselenggaranya aktifitas akademik yang jauh bermutu. Dorongan ini bisa terwujud dengan bantuan orang tua serta warga untuk mengamati serta mendampingi pembelajaran anak di rumah. Tidak hanya itu tidak sedikit pemerinta maupun non pemerintah yang bisa memberi kesempatan agar praktek ataupun magang. Hal ini dilaksanakan agar memperoleh wawasan secara nyata terhadap peserta didik.

### 4. Partisipasi cultural

Perhatian warga kepada terjadinya norma budaya serta nilai-nilai yang ada di wilayah sekitar sekolah hingga sekolah dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan warga sekitar.

## **2. Dukungan Pemerintah Desa**

### **a. Pengertian Pemerintah Desa**

Secara Etimologi, kata desa asalnya dari bahasa sansekerta, deca yang artinya tanah air, tanah asal, ataupun tanah kelahiran. Dari perpektif geografis, desa ataupun village, yang berarti selaku "*a groups of houses or shof in a country area, smaller than and town*". Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang punya kewenangan guna mengurus rumah tangganya sendiri didasarkan hak asal usul serta adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional serta berada di daerah kabupaten.

Menurut widjaya HAW dalam (Cut Mafzatun dkk 2017:36) menyatakan bahwa desa ialah selaku kesatuan masyarakat hukum yang punya kewenangan guna mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan asal usul serta adat istiadat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasioanal. Pemerintahan ialah sekumpulan orang mengelola kewenangan, melakukan kepemimpinan, serta koordinasi dan pembangunan tempat mereka bekerja. Secara etimologi, pemerintahan bisa sebagai yang melaksanakan pekerjaan didalamnya 2 pihak yaitu memerintah, mempunyai tanggungjawab yang diperintah mempunyai kepatuhan serta keharusan (Adon, 2015).

Peraturan desa ialah peraturan perundangan yang diresmikan oleh Kepala Desa serta disahkan bersama dalam musyawarah desa. Peraturan desa dibangun supaya adanya penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab itu, peraturan jadi berarti untuk penyeimbang pemerintahan Desa serta Permusyawaratan Desa. Peran peraturan desa dilaksanakan kebijakan setempat serta tidak terlepas dari peraturan undang-undang selain itu juga tidak boleh merugikan semua orang, serta tidak boleh berlawanan dari undang-undang desa.

Selain itu, peraturan yang ada didesa diresmikan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga sesi berikutnya merupakan penerapan aturan desa dilaksanakan Kepala Desa. Setelah itu, BPD sebagai mitra pemerintahan desa memiliki hak melaksanakan pengawasan serta penilaian hasil penerapan peraturan didesa itu. Sebaliknya warga sebagai penerima manfaat, juga memiliki hak untuk melaksanakan monitoring serta penilaian terhadap penerapan peraturan desa (Solekhan, 2015).

## **b. Penyelenggara Pemerintahan Desa**

Bagian dari pemerintahan desa yaitu pimpinan/kepala desa sekretaris serta perangkat desa. Pelaksana dilapangan semacam kepala pegurus, serta kepala dusun ataupun dengan istilah lain, yang dituju dengan “perangkat desa lainnya” pada ketetapan ini merupakan perangkat pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan contohnya kepala urusan, serta unsur daerah contohnya kepala dusun ataupun dengan sebutan lain. Total perangkat desa disesuaikan dengan keperluannya, keadaan sosial warga sekitar, serta kesanggupan keuangan desa (Didik, 2016).

Tugas sekretaris desa yakni menolong pimpinan dalam keadministrasian pemerintahan. Berikut penjelasan sekretaris desa mengenai administrasi pemerintahan desa. “Bersumber pada Peraturan Menteri No 47 Tahun 2016 mengenai administrasi pemerintahan desa. Administrasi pemerintahan desa merupakan totalitas tahapan aktivitas pencatatan informasi serta data pemerintahan pada buku Register Desa. Admisi tadi terdiri dari administrasi universal, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, serta administrasi yang lain. Penerapan di tugas sekretaris desa harus sesuai dengan pengaturan yang sudah di buat oleh pemerintah.

## **c. Indikator Dukungan Pemerintah Desa**

Variabel peran dukungan pemerintah desa dapat di ukur menurut Munir (2010) menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

### *1. Entrepreneur*

*Entrepreneur* ialah individu yang melaksanakan aktivitas wirausaha yang umumnya mempunyai bakat dalam pengenalan serta penentuan cara produksi baru, membuat standar operasional, pemasaran produk, serta dapat mengatur modal guna operasional. Perihal ini mesti mempunyai beberapa keahlian yakni mesti sanggup berfikir kreatif serta imajinatif, perihal ini diperlukan sebab pribadi *entrepreneur* mesti selalu dapat guna terus melakukan inovasi dalam melangsungkan usaha yang digarapnya. Disamping itu, *entrepreneur* umumnya lewat usahanya memberi manfaat terhadap individu lain di lingkungannya (Daeng, 2019).

Dalam bahasa Prancis *entrepreneur* disebut juga *entrepreneur*, dalam bahasa Inggris *entrepreneurship*, dalam bahasa Belanda *Unternehmer* serta dalam bahasa Jerman yakni *ondernemen*. Dalam perspektif ekonomi kata *entrepreneur* bisa dimaknai selaku individu yang sanggup secara gagah berani memulai serta menjalani usaha. Secara Konseptual kata *entrepreneurship* punya makna yang bermacam yakni diantaranya menyebutkan bahwasanya *entrepreneur* ialah individu yang terampil mempergunakan peluang dalam pengembangan usahanya guna peningkatan kehidupannya.

Pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya untuk mengatur sumber daya potensial maupun hal-hal yang ada sehingga menguntungkan dan memberi manfaat untuk masyarakat. 6 sifat *entrepreneur*, yaitu pantang menyerah, mampu mengelola, berani menghadapi tantangan, potensial, berinovasi, dan mempunyai kepercayaan terhadap diri.

## 2. Koordinator

Menurut KBBI Koordinator merupakan orang yang melakukan koordinasi, orang yang mengoordinasi. Pemerintahan memiliki suatu cara yang bisa membuat terlibat di pendidikan. Ada beberapa peran pemerintah dalam koordinator yaitu: memberi dukungan, mengkoordinasikan, menjaga komunikasi, mengembangkan program, menjadi pengawas, mengarahkan, mampu bertindak atas sesuatu informasi, dan memberikan supply.

### 3. Fasilitator

Fasilitator ialah peran yang berhubungan dengan memotivasi, kesempatan, serta dukungan guna masyarakat. Tugas yang berhubungan dengan peran ini yakni selaku model, melaksanakan mediasi ataupun negosiasi, memberikan dukungan, membuat bangkitnya konsensus bersama, serta mengorganisasikan serta memanfaatkan sumber.

Selau fasilitator pemerintah memiliki fungsi yang sangat penting, sebagai memfasilitasi yang akan membuat cepat pendidikan melalui pembenahan, berupa izin, dan penempatan pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, fasilitator bertugas untuk mengaplikasikan peraturan dan pendampingan, melaksanakan kegiatan, menangani permasalahan dalam pelatihan, dan penguatan kelompok

### **3. Hubungan Dukungan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dengan Pelaksanaan Pendidikan Non Formal**

Bagian utama yang wajib dijadikan sebagai dasar pembangunan ialah memastikan kedudukan pemerintah didalam membangun bersamawarga. Tjokroamidjojo didalam Heningtyas et al., (2015) kedudukan pemerintah

merupakan penjaga keamanan serta kedisiplinan dalam perkembangan, penafsiran mengenai *service state*, yang mana peranan pemerintah ialah abdi sosial atas kebutuhan yang dibutuhkan di antara warga serta pemerintah selaku *entrepreneur* ataupun pemotivasi inisiatif upaya dari warga. Pemerintah jadi *development agent* ataupun aspek sebagai pembaharuan ataupun pembangunan. Kedudukan pemerintah desa sebagai: peran legalitas serta fungsi hukum, peran pembinaan, peran fasilitator, peran pemasaran serta promosi, peran keamanan serta kedisiplinan. Kenyataannya peran pemerintah masih dijalankan baik universal, tidak terdapat ketentuan spesial yang mengendalikan mengenai perkembangan pendidikan nonformal.

Kedudukan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal menjadi organisator (*organizer*), maksudnya Pemerintah Desa ialah aspek yang membangkit, mendesak, memfasilitasi, serta pengelolaan ide-ide dan aktivitas pembangunan di antara warga pada aspek pendidikan nonformal serta penerapan peran itu dipecah jadi 3 sesi ialah sesi persiapan, penerapan, serta penilaian. Dalam melaksanakan perannya, Pemerintah Desa membentuk satuan pembelajaran yang didalamnya mencakup rancangan pendidikan nonformal. Satuan pendidikan nonformal yang dibangun oleh Pemerintah Desa tersebut merupakan Pusat Aktivitas Belajar Warga (PKBM), Lembaga Kursus serta Pelatihan (LKP), serta Desa Vokasi.

Adanya partisipasi masyarakat secara aktif, masyarakat sanggup mengemukakan aspirasi mereka serta permasalahannya sendiri selaku orang yang ikut serta dari perencanaan, pelaksanaan serta hasil. Partisipasi masyarakat yang

aktif diharapkan dapat memberikan perubahan pada pendidikan nonformal yang lebih baik lagi. Partisipasi yang di berikan masyarakat, tidak hanya dalam bentuk materi saja, namun masyarakat juga ikut menyelenggarakan dan dan berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga serta pikiran untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dalam dunia pendidikan. Partisipasi masyarakat yang besar dilihat dengan cara lembaga berhubungan baik dengan masyarakatnya. Suryosubroto (2012) mengatakan bahwa banyak yang menjadi perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah program dalam bentuk perencanaan dalam membuat keputusan, pelaksanaan program serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil dan evaluasi dalam program yang telah dilakukan dalam pendidikan nonformal yang diselenggarakan

Terselenggaranya rancangan pendidikan nonformalnya pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan keahlian serta pelatihan kerja, dan pendidikan anak umur dini. Peran Pemerintah dalam menyelenggarakan pembelajaran nonformal sangat berarti sebagai upaya kenaikan mutu sumber daya manusia. Sebab dengan terdapatnya peran pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal hingga tingkatan pendidikan masyarakat jadi lebih baik, tidak hanya itu pula menaikkan pengetahuan serta keahlian warga didalam meningkatkan upayanya. Dengan begitu, mutu sumber daya manusia di Desa jadi bertambah. Dengan peningkatan mutu sumber daya manusia tersebut, masyarakat jadi jauh sejahtera serta tingkatan kehidupan juga bertambah. Bersumber pada jабaran diatas hingga disimpulkan kalau dukungan pemerintah sangat mempengaruhi pada pendidikan non formal di Desa Marunggi.

## **B. Penelitian Relevan**

Berdasarkan kajian teori yang penulis lakukan, menemukan hasil skripsi yang sama. Berikut ini ditemukan adanya hasil skripsi yang sama dan ada kaitannya pada variabel yang penulis teliti antara lain:

1. Tio Ramadan (2021) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, “Gambaran Dukungan Pemerintah Terhadap Pendidikan Nonformal di Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan”

Dalam judul penelitian di atas terdapat persamaan variabel pada judul skripsi yang peneliti gunakan yaitu variabel Peran Dukungan Pemerintah dan Pendidikan Nonformal. Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat adalah peneliti mencari hubungan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan non formal, sedangkan dalam skripsi penelitian terdahulu hanya mendeskriptif mengenai Fungsi Pemerintah serta usaha warga dalam mengembangkan pendidikan nonformal.

2. Dinisti (2017) Jurusan Politik Dan Pemerintahan Fisip UNDIP “Peran Pemerintah Kabupaten Kendal Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Kendal”

Dalam judul penelitian di atas terdapat persamaan variabel pada judul skripsi yang peneliti gunakan yaitu variabel Peran Pemerintah dan Pendidikan Nonformal. Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat adalah peneliti mencari hubungan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan nonformal, sedangkan dalam skripsi penelitian terdahulu mengkaji penelitian

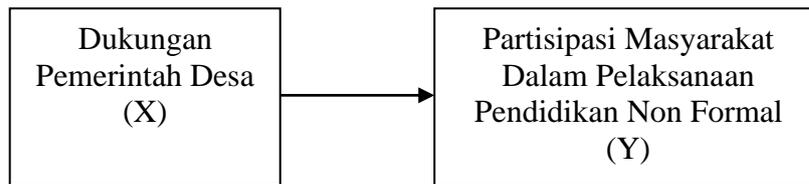
kualitatif mengenai peran pemerintah didalam penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah suatu usaha agar terciptanya SDM yang berkualitas.

3. Dacholfany (2018) Universitas Muhammadiyah Metro Lampung “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non Formal Di Metro Lampung (Studi Kasus PKBM Al-Suroya).

Dalam judul penelitian di atas terdapat persamaan variabel pada judul skripsi yang peneliti gunakan yaitu variabel Pendidikan Nonformal. Perbedaan dengan skripsi yang penelitian buat adalah peneliti mencari hubungan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan nonformal, sedangkan dalam skripsi penelitian terdahulu mengkaji penelitian kualitatif mengenai pemberdayaan terhadap usaha

### **C. Kerangka Berpikir**

Dari penjelasan pada bagian teori diatas maka hal yang penting dalam penelitian ini ialah agar melihat hubungan antara dukungan pemerintah desa dengan pelaksanaan pendidikan nonformal di Desa Marunggi Kota Pariaman. Adapun variabel idependen (X) ialah variabel yang menjadi penyebab adanya variabel dependen, yaitu dukungan pemerintah desa serta variabel terikat (Y) yaitu variabel yang mempengaruhi dan menjadikan suatu dampak timbulnya variabel bebas, yaitu partisipasi masyarakat pelaksanaan pendidikan non formal di Desa Marunggi Kota Pariaman, kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

#### **D. Hipotesis Penelitian/Pertanyaan Penelitian**

1. Hipotesa penelitian ini ialah terdapat:

Terdapat Hubungan yang signifikan antara Dukungan Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal

2. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:
  1. Dukungan pemerintah desa dengan pendidikan nonformal
  2. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian Hubungan Dukungan Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di desa Marunggi Kota Pariaman, bisa dilihat dari hasil temuan dan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran Dukungan Pemerintah Desa di desa Marunggi Kota Pariaman dikategorikan sangat tinggi dengan nilai persentase 66,7% pada rentang skor  $\geq 156$ . Penelitian ini bisa ditarik simpulan yakni masyarakat di Desa Marunggi mempunyai Dukungan Pemerintah yang sangat tinggi. Pemerintah desa dalam menjalankan kewajiban pembangunan serta pelaksanaan pelayanan terhadap warga sudah mengawasi keterkaitan kemitraan kerja didalam pelaksanaan pemerintahannya
2. Gambaran Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal dikategorikan sangat tinggi dengan nilai persentase 51,9% pada rentang skor 90-104. Penelitian ini bisa ditarik simpulan yakni masyarakat di Desa Marunggi mempunyai Dukungan Pemerintah yang tinggi. Maka bisa dirangkum simpulan pada penelitian ini sebagian besar Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Didesa Marunggi Kota Pariaman dalam kategori tinggi. Pendidikan nonformal dilaksanakan terhadap warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan yang

berperan selaku pengganti, penambah, bahkan kelengkapan pendidikan formal didalam upaya mendorong pendidikan sepanjang hayat.

3. Terdapat keterkaitan yang sangat jelas antar Dukungan Pemerintah Terhadap Antusias Warga Didalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di desa Marunggi Kota Pariaman dengan demikian nilai korelasi sebesar 0,869 dengan  $p < \alpha 0,009$ . Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan ada hubungan Dukungan Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Nonformal di desa Marunggi Kota Pariaman dapat diterima.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan bagi lembaga pemerintah harus adanya dorongan terhadap masyarakat dalam kegiatan pendidikan nonformal yang berguna memberikan wadah untuk dapat menambah ilmu sepanjang hayat hayat
2. Pemerintah desa Marunggi Kota Pariaman perlu mencari dana tambahan dengan melakukan penggalangan keuangan. Tidak hanya itu juga bisa dibebankan kepada warga sekitar yang dirasa bisa agar dapat memberi bantuan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan nonformal
3. Pemerintah desa Marunggi Kota Pariaman butuh mencari tenaga pendidik dengan mengikutsertakan lembaga serta organisasi sosial kemasyarakatan contohnya Aisyiah, Muslimat Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu bisa melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi agar dapat memposisikan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah desa Marunggi Kota Pariaman, yang mana rancangan kerjanya memprioritaskan aktifitas pembelajaran terhadap warganya.

4. Warga yang mengikuti pendidikan nonformal wajib bisa mempergunakan bantuan serta fasilitas yang telah disiapkan oleh desa Marunggi Kota Pamiaran secara tepat, karena bantuan serta fasilitas tersebut sebagai peluang warga didalam peningkatan mutu serta kesejahteraan hidupnya.
5. Warga diharapkan mendukung pemerintah didalam usaha peningkatan mutu sumber daya manusia dengan cara meniadakan rasa malas didalam kegiatan pembelajar, dikarenakan pendidikan itu penting terhadap kehidupan mereka serta tidak ada kata terlambat didalam belajar agar mendorong pendidikan sepanjang hayat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adon, N. J. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka setia.
- Ahmadi, A., & Uhbiyati, N. (2011). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Albert, K. (2011). *Serba-Serbi, Analisis Statistika dengan Cepat dan Mudah*. Jakarta: Jasakom.
- Alfiyan, D., Solfema, S., & Irmawita, I. (2018). *Hubungan antara Persepsi Peserta terhadap Instruktur dengan Partisipasinya dalam Mengikuti Diklatsar di KSR PMI Unit UNP. SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 6(3), 356.
- Arikunto. (2016). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrarudin, & Dewi, dyah utami. (2021). *Dampak Kecerdasan Emosional Dan Modal Intelektual Pada Produktivitas Belajar Online / Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Mahasiswa*, 27(1), 1–17.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dacholfany, M. I. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non Formal Di Metro Lampung (Studi Kasus PKBM Al-Suroya)*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 43–50.
- Didik, S. (2016). *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dinisti, A. L. (2017). *Peran Pemerintah Kabupaten Kendal Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Kendal. Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip Undip*, 53(9), 1689–1699.
- Ghozali, I. (2018). *Ghozali 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Heningtyas, M. A., Sjamsuddin, S., & Hadi, M. (2015). *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal. Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 5. Recuperato da <https://media.neliti.com/media/publications/77616-ID-peran-pemerintah-dan->

masyarakat-dalam-up.pdf

- Hetifah, S. S. (2015). *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Irmawita. (2018). *Pengelolaan Program Pendidikan Nonformal untuk Kelompok Masyarakat Lanjut Usia*. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 1–8.
- Ishak, Abdulhak, U. S. (2017). *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Non Formal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Jalal, F., & Supriadi., D. (2011). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Maani, K. D. (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 17–30.
- Munir, F. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Normina. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 14(26), 71–85.
- Notoatmodjo. (2017). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sanapiah, F. (2016). *Pendidikan non formal Di dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional*. Surabaya: Usaha Offset Printing.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Siswanto. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Soelaman, J. (2015). *Konsep Dasar Pendidikan non formal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solekhan. (2015). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara*. Malang: Setara.
- Solfema. (2021). *Statistik Pendidikan Teori dan Praktik dalam Pendidikan Luar Sekolah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Sudjana. (2015). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf*.

- Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*
- Sumaryadi, N. (2014). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sunarti, V. (2014). *Peranan Pendidikan Luar Sekolah Dalam Rangka Mitigasi Bencana. SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(2).
- Suryosubroto. (2012). *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrudin, W. (2016). *Komunikasi Pada Lembaga Pendidikan Nonformal : Suatu Kajian Dalam Latar Budaya Minangkabau*. Jakarta.
- Tio Ramadan. (2021). *Gambaran Dukungan Pemerintah Pada Pendidikan Non Formal Di Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan. Pendidikan Luar Sekolah*.
- Ulumiyah, I. (2013). *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 890–899.
- Wahyudi, A. (2016). *Peningkatan Kapasitas Desa*. Jakarta: Data Katalog PKP2A III LAN.